# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Reformasi adalah perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, merupakan gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, khususnya dalam memperbaiki struktur kehidupan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.[1] Gerakan reformasi muncul sebagai respons terhadap krisis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial menjadi faktor-faktor pendorong lahirnya gerakan reformasi, ditambah dengan berbagai peristiwa lain yang turut berperan. Bahkan, krisis kepercayaan menjadi salah satu indikator utama yang mendorong gerakan ini. Reformasi dianggap sebagai suatu kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia sepenuhnya mendukung gerakan reformasi tersebut.

Indonesia mengalami salah satu perubahan politik selama periode 1998-1999 yang dikenal sebagai masa Reformasi. Reformasi ini dipicu oleh berbagai faktor yang mendorong perubahan besar dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial setelah 32 tahun pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awalnya, pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada 1966 berhasil membawa stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin meluas. Kekuasaan yang terpusat pada militer dan kelompok elit politik menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Pemerintah Orde Baru juga menekan kritik dan oposisi, membatasi kebebasan pers, dan mengurangi hak-hak demokratis.[2]

Krisis ekonomi Asia pada 1997 memperburuk situasi. Nilai tukar rupiah merosot tajam, inflasi meningkat, dan banyak perusahaan bangkrut. Kondisi

---

[1] Maria Winda, "*Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999*", Jurnal Santiaji Pendidikan, Vol 10, No 1, hal. 88-92.

[2] Sri Handayani, "*Dinamika Politik Pemerintahan Era Reformasi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Vol. 1 No. 2, hal. 232-236

ekonomi yang memburuk memperparah penderitaan masyarakat, terutama di kalangan menengah dan bawah yang menghadapi kenaikan harga bahan pokok dan meningkatnya pengangguran. Pada 1998, krisis ini memicu gelombang protes besar yang dipelopori mahasiswa dan masyarakat sipil, menuntut reformasi politik, pengunduran diri Soeharto, dan diakhirinya KKN. Tekanan semakin memuncak setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak saat demonstrasi. Insiden ini memicu kerusuhan di Jakarta dan berbagai kota lain, yang memperparah krisis politik.[3]

Kerusuhan Mei 1998 sering dikaitkan dengan peristiwa penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, yang terjadi hanya sehari sebelum kerusuhan besar meletus. Meskipun peristiwa itu memang memiliki dampak emosional yang besar dan memicu gelombang kemarahan masyarakat, namun memahami kerusuhan tersebut hanya dari sudut pandang insiden itu saja merupakan penyederhanaan yang terlalu dangkal. Sesungguhnya, kerusuhan Mei 1998 merupakan bagian dari rangkaian kompleks peristiwa yang telah berlangsung sebelumnya, bersamaan, dan bahkan setelahnya. Kerusuhan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai tekanan dan konflik dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi yang telah berlangsung lama. Ketegangan sosial meningkat seiring dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang dianggap otoriter dan korup. Di sisi lain, situasi politik saat itu tengah mengalami ketidakstabilan karena tuntutan reformasi yang semakin menguat, sementara pemerintah gagal meresponsnya secara bijak.[4]

Di tengah krisis politik tersebut, kondisi ekonomi nasional juga mengalami keterpurukan. Dampak dari krisis moneter Asia yang dimulai pada 1997 terasa semakin dalam di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk merespons krisis malah memperparah keadaan. Harga-harga barang,

[3] Max Lane, "*Bangsa Yang Belum Selesai, Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto*", (Jakarta: reform institute), hal 54.

[4] Juliandry Hutahaean, *"Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003",* Journal of Indonesian History, Vol. 3 No. 1, hal. 29

terutama kebutuhan pokok, melonjak tajam dan di luar jangkauan masyarakat kelas bawah. Inflasi yang tinggi, pengangguran yang meningkat, dan ketidakpastian masa depan membuat masyarakat hidup dalam tekanan luar biasa. Kemarahan terhadap ketidakadilan, penderitaan ekonomi yang meluas, dan lemahnya respons politik pemerintah membentuk kondisi ideal bagi meledaknya kerusuhan besar. Dengan demikian, kerusuhan Mei 1998 harus dipahami sebagai sebuah peristiwa multidimensional yang dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait dan memuncak dalam bentuk letupan sosial.

Kerusuhan Mei tidak hanya terjadi di Jakarta melainkan di beberapa kota di Indonesia, kerusuhan juga terjadi di Medan dan sekitarnya (4-5 Mei), Palembang (13 Mei), serta Solo dan sekitarnya (14-15 Mei). Salah satu pemicu kerusuhan salah satunya dimulai di Jakarta Barat tepatnya di depan kampus Trisakti, terjadi pembakaran pm bensin dan perusakan pos polisi di terminal Grogol oleh massa, aksi tersebut kemudian meluas kearah utara Jakarta dan pada sisi lain meluas kearah timur, pada sisi barat bergerak kearah jl. Daan mogot hingga sekitar Cengkareng dan sisi Selatan terjadi di sekitar Slipi, kerusuhan berikutnya pada tanggal 13 Mei berlangsung hingga malam hari. Memasuki tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan yang awalnya terfokus di beberapa titik di Jakarta mulai menjalar dengan cepat ke berbagai wilayah lain yang letaknya saling berjauhan. Seiring berjalannya waktu, terutama menjelang siang hari, jumlah titik kerusuhan semakin bertambah dan meluas ke hampir seluruh penjuru ibu kota. Hari itu menjadi puncak dari rangkaian kerusuhan yang mengguncang Jakarta secara besar-besaran. Aksi kekerasan, penjarahan, dan pembakaran berlangsung secara masif. Di sepanjang jalan-jalan utama, ruko-ruko dan pusat perbelanjaan menjadi sasaran amukan massa. Mall, toko-toko, serta kendaraan pribadi dan umum dibakar tanpa kendali. Perisiwa yang buruk terjadi di Yogya Plaza di daerah Klender Jakarta Timur, Dimana 174 orang terbakar disitu. Banyak dari barang-barang hasil penjarahan yang kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dibuang dan dibakar begitu saja di tengah jalan, sementara sebagian lainnya dibawa pulang oleh pelaku penjarahan.[5]

Pada 15 Mei 1998, keesokan harinya, intensitas kerusuhan mulai menunjukkan penurunan. Aparat keamanan, dalam hal ini ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), mulai mengambil kendali dengan melakukan patroli-patroli bersenjata secara intensif di berbagai titik rawan. Tindakan tegas mulai diberlakukan untuk membubarkan kerumunan dan mencegah aksi kekerasan lebih lanjut. Kehadiran militer di jalan-jalan utama berhasil meredam sebagian besar aktivitas kerusuhan yang masih tersisa. Keadaan mulai terkendali, sisa-sisa kehancuran masih sangat jelas terlihat. Sepanjang jalan-jalan besar Jakarta, mobil dan sepeda motor yang hangus terbakar menjadi pemandangan umum. Salah satu wilayah yang terdampak parah adalah daerah Petukangan, yang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat keturunan Tionghoa. Daerah ini juga tidak luput dari amukan massatoko-toko dirusak, dijarah, dan kemudian dibakar. Serangan terhadap komunitas Tionghoa ini mencerminkan dimensi etnis yang menyedihkan dalam kerusuhan, menambah kompleksitas dan kepedihan dalam tragedi nasional tersebut.[6] Menteri koordinator ekonomi dan keungan Ginandjar Kartasasmita pada sekitar tanggal 18 mei menyatakan bahwa kerugian di Jakarta akibat kerusuhan itu mencapai Rp. 2,5 triliun (kurang lebih 250 juta dolar AS bila dihitung dengan kurs yang berlaku saat itu). Ia menyatakan, 2479 toko mengalami kerusakan atau dihancurkan dengan menggunakan api. (toko-toko yang rusak umumnya kecil, hampir selalu milik orang-orang China, dan merupakan pusat perbelanjaan dimana masyarakat kota menggantungkan diri).[7]

Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mundur setelah 32 tahun berkuasa, dan B.J. Habibie, wakilnya, diangkat menjadi presiden. Pemerintahan Habibie menandai awal era Reformasi dengan langkah-langkah penting seperti pembebasan

[5] Juliandry Hutahaean, *"Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa di Petukangan Jakarta Tahun 1998-2003",...,* hal 30

[6] Turmudi, Endang, "*Merajut harmoni, membangun bangsa: memahami konflik dalam masyarakat Indonesia"*. (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia), hal. 18

[7] Edward Aspinall, *"Titik Tolak Reformasi*", (Yogyakarta:LKiS), hal.140

pers, pembebasan tahanan politik, dan pelaksanaan Pemilu yang lebih demokratis pada 1999.[8] Namun, masa transisi ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk konflik etnis dan agama, gerakan separatis di Timor Timur (yang merdeka pada 1999), serta ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah pasca-Soeharto menghadapi tugas berat dalam memulihkan stabilitas politik, memperbaiki ekonomi, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara. Secara keseluruhan, periode Reformasi 1998-1999 menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju demokrasi, meskipun masih menyisakan berbagai tantangan dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan.

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya, yaitu era Reformasi. Era ini ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan dilanjutkan oleh kepemimpinan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Meskipun masa kepemimpinan Habibie tergolong singkat, yaitu sekitar satu tahun, kontribusinya dalam membuka jalan bagi demokratisasi sangat signifikan. Ditandai oleh berbagai langkah strategis dalam reformasi politik. Salah satu pencapaian utama pada periode ini adalah pembahasan dan pengesahan sejumlah undang-undang penting di bidang politik, yang kemudian dikenal sebagai paket undang-undang politik reformasi. Tiga undang-undang krusial yang lahir dari proses ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[9]

Ketiga regulasi ini menjadi fondasi baru dalam struktur sistem politik Indonesia yang lebih terbuka, inklusif, dan demokratis dibandingkan dengan era Orde Baru yang cenderung sentralistis dan otoriter. Salah satu dampak signifikan

[8] Max lane, "*Bangsa Yang Belum Selesai, Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto*"…, hal 76.

[9] Indra Pahlevi, "*Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia",* Jurnal Politica Vol. 5 No. 2 hal. 111

dari UU No. 2 Tahun 1999 adalah terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik melalui pendirian dan keikutsertaan dalam partai politik. Masyarakat kini memiliki kebebasan yang dijamin oleh undang-undang untuk mendirikan partai politik sebagai sarana perjuangan politik, representasi kepentingan publik, serta partisipasi dalam pemilu. Kebijakan ini menandai berakhirnya dominasi terbatas partai politik seperti yang terjadi di masa sebelumnya, dan mendorong tumbuh suburnya berbagai partai dengan latar belakang ideologi dan basis massa yang beragam. Pemilu 1999 diselenggarakan dengan semangat reformasi yang tinggi dan berhasil dilaksanakan secara damai, terbuka, serta partisipatif. Salah satu pencapaian penting dari pemilu ini adalah tingginya jumlah partai politik yang ikut serta, yakni sebanyak 48 partai. Banyaknya partai yang ambil bagian menunjukkan adanya kebebasan politik yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya, serta mengindikasikan kembalinya hak politik warga negara untuk berkumpul dan berorganisasi secara demokratis. Salah satu asas fundamental yang diterapkan dalam pelaksanaan pemilu ini adalah asas *langsung*. Artinya, setiap pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara, berdasarkan kehendak hati nurani masing-masing. Asas ini memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Selain asas langsung, pemilu juga dijalankan dengan asas lain seperti umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), yang kesemuanya menjadi pilar dalam menjamin kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.[10]

Kebijakan lain yang dilakukan Habibie adalah dalam bidang kebebasan berekspresi dan pers. Di bawah pemerintahannya, disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah kebebasan media di Indonesia. Undang-undang ini mencabut berbagai pembatasan yang selama rezim Orde Baru menghambat kebebasan pers dan menghilangkan praktik sensor serta intervensi pemerintah terhadap media massa. Dengan

[10] Junior Hendri dkk, *"Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia"*, Jurnal Cakrawala Vol. 12 No. 2, hal. 203

diberlakukannya undang-undang ini, media di Indonesia memperoleh ruang yang lebih luas untuk beroperasi secara independen, menyuarakan opini, serta mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa rasa takut akan tekanan atau pembredelan. Langkah ini bukan hanya memperkuat posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi, tetapi juga menjadi salah satu simbol utama dari transformasi menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Reformasi di bidang pers ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan masyarakat sipil yang lebih aktif dan berdaya di Indonesia.[11]

Di tengah gejolak sosial dan politik pada masa itu, media memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Pada awal abad ke-20, para tokoh nasional Indonesia mulai menginisiasi pembaruan di berbagai bidang, seperti politik, ilmu pengetahuan, sosial-budaya, dan komunikasi. Salah satu wujud dari pembaruan tersebut terjadi dalam bidang pers dan media massa. Pembaruan ini bertujuan menjadikan pers sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan menjadi platform untuk pengembangan sumber daya masyarakat. Sebelumnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai politik, pendidikan, sosial, dan agama.[12]

Majalah *Suara Muhammadiyah* dan *Risalah* Persis merupakan dua media cetak Islam yang aktif dalam rentang waktu tersebut. Keduanya memiliki orientasi keagamaan yang sama-sama berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun memiliki latar sosial-politik yang berbeda. *Suara Muhammadiyah*, sebagai media resmi organisasi Muhammadiyah, pada waktu itu dipimpin oleh Amien Rais seorang tokoh sentral dalam gerakan reformasi. Posisi strategis Amien Rais dalam dinamika politik nasional memberikan nuansa politis yang kuat terhadap arah pemberitaan *Suara Muhammadiyah*, terutama dalam menyoroti isu-isu reformasi. Majalah ini berpotensi menampilkan dukungan, kritik, dan wacana reformasi dari

[11] Nadia Kusuma, "*Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke Era Demokrasi di Indonesia*", Jurnal Historia Vitae, Vol. 04, No.02, hal. 84

[12] Sandya Sahisnu, "*Kontribusi Suara Muhammadiyah Bagi Pengembangan Masyarakat Islam Di Indonesia (1915-1957*)". Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Vol. 19 No. 2, hal. 230.

perspektif internal gerakan, sekaligus mencerminkan keterlibatan langsung organisasi dalam perubahan sosial-politik nasional.

Berbeda dengan itu, *Risalah* yang diterbitkan oleh Persatuan Islam (Persis), lebih berperan sebagai media dakwah yang menitikberatkan pada penyebaran nilai-nilai keislaman. Meski tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktor politik utama pada masa reformasi, majalah ini tetap menanggapi peristiwa tersebut melalui sudut pandang keagamaan dan moralitas. Kehadiran pemberitaan reformasi dalam *Risalah* lebih sebagai bentuk respons intelektual dan spiritual terhadap dinamika sosial yang tengah terjadi di tengah masyarakat.

Perbedaan latar belakang kedua media ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana masing-masing memaknai dan memberitakan peristiwa reformasi. Sejauh mana peran tokoh dan afiliasi politik berpengaruh terhadap isi pemberitaan. Bagaimana gaya penyampaian, dan narasi yang dibangun oleh masing-masing media. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan isi pemberitaan peristiwa reformasi dalam *Suara Muhammadiyah* dan *Risalah*. Dengan melakukan perbandingan terhadap kedua media tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana organisasi masyarakat Islam menyikapi perubahan politik melalui media mereka, serta peran ideologis yang dimainkan dalam membentuk opini umat pada masa transisi menuju demokrasi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Isu - Isu Reformasi Dalam Berita Media Organisasi Masyarakat Islam (Majalah Suara Muhammadiyah Dan Majalah Risalah Persis Tahun 1998-1999).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, agar pembahasan dalam penelitian lebih jelas dan terstruktur secara sistematis, maka penulis menyusun suatu rumusan masalah, diataranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peristiwa Reformasi di Indonesia Tahun 1998-1999?

2. Bagaimana Pemberitaan Majalah Suara Muhammadiyah dan Majalah Risalah Persis Tentang Reformasi 1998-1999?

**C. Tujuan Penelitian**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas pertanyaanpertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Mengetahui Peristiwa Reformasi Tahun 1998-1999
2. Mengetahui Pemberitaan Majalah *Suara Muhammadiyah* dan Majalah Risalah Persis Tentang Reformasi 1998-1999

**D. Kajian Pustaka**

Setelah penulis melakukan pencarian di internet, dan melakukan pencarian di perpustakaan, penulis menemukan beberapa sumber berupa buku dan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Penulis berhasil menemukan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Sandya Sahisnu yang berjudul "*Kontribusi Suara Muhammadiyah Bagi Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia (1915-1957)"*

Jurnal yang ditulis oleh Sandya Sahisnu berisi tentang latar belakang terbentuknya majalah *Suara Muhammadiyah* dimana sesuai rentan tahun di judul yaitu pada tahun 1915 yang merupakan awal terbentuknya *suara muhammadiyah* sampai akhirnya kontribusi *suara muhammadiyah* bagi pengembangan masyarakat islam yang mana topik dan pembahasan majalah pada tahun - tahun pertamanya berfokus pada ajaran-ajaran dasar agama Islam. Pada masa Kolonial Belanda, majalah *Suara Muhammadiyah* banyak membahas tentang ajaran - ajaran Islam dan perkembangan organisasi Muhammadiyah seperti kongres Muhammadiyah. Majalah *Suara Muhammadiyah* kemudian mengalami kemunduran pada masa penjajahan Jepang karena pemerintah Jepang melarang segala bentuk pergerakan organisasi yang berskala nasional termasuk gerakan pers. Setelah kemerdekaan Indonesia, Suara Muhammadiyah sudah bisa terbit secara rutin. Tema yang dibahas

dalam majalah juga lebih luas dan menyesuaikan perkembangan zaman.[13] Adapun perbedaan dengan yang penulis tulis adalah rentan tahun yang di teliti selain itu juga pembahasan yang berbeda dimana penulis membahas tentang peristiwa reformasi yang ada di majalah *suara Muhammadiyah* serta pemberitaan majalah risalah guna melihat perbedaan perspektif antara kedua majalah tersebut, sedangkan jurnal ini membahas tentang perkembangan isi pemberitaan *suara muhammadiyah* dari masa kolonial sampai kemerdekaan dan kontribusinya terhadap umat islam.

2. Skripsi Adzra Hulwatul Haura yang berjudul "*Pesan Dakwah Dalam Majalah Suara Muhammadiyah 1971-1974*"

Skripsi yang ditulis oleh Adzra Hulwatul Haura berisi tentang perkembangan suara muhammadiyah pada tahun 1971-1974. selain itu, skripsi ini berfokus pada konten dakwah islam yang ada di *suara muhammadiyah* di bidang Akidah, Ibadah, Akhlak dan Muamalah, periode yang dipilih penulis di pilih karena adanya perkembangan *suara muhammadiyah* yang lebih baik dari segi redaksi maupun isi. media cetak seperti *suara muhammadiyah* ini berkembang karena pada awal abad ke-20 mulai digunakan organisasi islam untuk menyebarkan pahampaham keagamaan atau sebagai media dakwah. melalui tulisan kepada masyarakat dalam penelitian ini, Adzra Hulwatul Haura menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun perbedaanya dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penulis mengambil sisi politik dari pemberitaan *suara muhammadiyah*. selain itu yang penulis teliti adalah pemberitaan pada peristiwa reformasi di majalah suara Muhammadiyah dan majalah risalah, perbedaan tahun dimana penulis menulis tahun 1998-1999 sedangkan skripsi terdahulu membahas tentang rubrik dakwah yang ada di majalah suara muhammadiyah, selain itu terdapat rentang tahun yang berbeda antara skripsi terdahulu dengan penulis.[14]

[13] Sandya sahisnu, "*Kontribusi Suara Muhammadiyah Bagi Pengembangan Masyarakat Islam Di Indonesia (1915-1957)".* Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Vol. 19 No. 2, hal. 229.

[14] Adzra hulwatul, "*pesan dakwah dalam majalah suara muhammadiyah 1971-1974*". (Skripsi: UIN syarif hidayatullah jakarta), hal. 17.

3. Skripsi Sulastri yang berjudul *"Perpolitikan di Indonesia Dalam Sorotan Pers Islam: Analisa Majalah "Risalah" Tahun 1998-1999"*

Skripsi yang ditulis oleh Sulastri berisi tentang pemberitaan politik di majalah *Risalah,* khusunya tahun 1998-1999, berfokus pada seluruh berita politik yang ada di majalah *Risalah* dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi apa saja yang diberikan persis melalui majalah *Risalah,* didalam penelitiannya Sulastri menjelaskan bahwa majalah *Risalah* tidak hanya berkontribusi di bidang dakwah melainkan berkontribusi terhadap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti memberitakan kebijakan ekonomi-politik, politik, politik-hukum, dan sosial-politik, Sulastri menggunakan metode penelitian Sejarah, Adapun perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis berfokus pada pemberitaan yang menyangkut peritiwa reformasi saja yang ada di bulan-bulan tertentu dan bahasan-bahasan tertentu, serta melihat majalah *Suara Muhamadiyah* guna melihat perbedaan perspektif di kedua majalah tersebut.[15]

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani metodos, yang berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk memandu dalam proses kajian atau pencarian sumber-sumber sejarah, yang nantinya akan diolah menjadi narasi sejarah. Secara sederhana, metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara atau prosedur.[16]

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya tidak langsung disusun begitu saja tanpa adanya sumber informasi sebagai media pendukung dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang kredible agar bisa dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana

[15] Sulastri, "*Perpolitikan Di Indonesia Dalam Sorotan Pers Islam: Analisa Majalah Risalah Tahun 1998-1999*" (skripsi: UIN syarif hidayatullah jakarta), hal. 4

[16] Sulasman, "*Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Apikasi*", (Bandung: Pustaka Setia), hal. 73.

pemberitaan di *Suara Muhammadiyah* tentang peristiwa reformasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan pokok bahasan.

**1. Heuristik**

Proses pengumpulan sumber dalam penelitian sejarah dinamakan Heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurishein, yang artinya memperoleh. Menurut G.J Renier heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber - sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi Sejarah.[17]

Menurut Sulasman, sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, sumber tertulis, yaitu keterangan sejarah yang disampaikan dalam bentuk tulisan, seperti laporan di atas kertas, batu, atau dinding. Kedua, sumber lisan, yang berasal dari kesaksian para pelaku sejarah. Namun, sumber ini memiliki kelemahan karena bergantung pada ingatan, kesan, dan penafsiran mereka. Ketiga, sumber benda, yaitu peninggalan budaya berupa artefak atau benda kuno dari masa lampau.[18]

Dalam penulisan hasil penelitian tentang peristiwa reformasi tahun 1998 1999 dalam pemberitaan suara muhammdiyah penulis telah mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber yang akan menjadi acuan dalam penulisan penelitian tersebut. Dalam melakukan tahapan heuristik, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Adapun tempat yang dikunjungi adalah sebagai berikut:

a. Kantor PW Muhammdiyah Jawa Barat
b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung
c. Perpustakaan Dispusibda Jawa Barat

[17] Aqmarina Lailani, "*Pengaruh Budaya Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik Masyarakat*", Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 67.
[18] Sulasman, "*Metodologi Penelitian Sejarah"*…, hal. 19.

d. Perpustakaan Batu Api

e. Perpustakaan Nasional

f. Arsip Nasional Indonesia

g. Percetakan Majalah Risalah

a. Sumber Primer

Sumber primer (primary sources) merujuk pada sumber atau penulis yang secara langsung menyaksikan, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang dicatat dalam sumber tersebut. Sumber primer adalah informasi yang masih asli dan belum diubah atau dimodifikasi isinya.[19]

Dalam meneliti peristiwa reformasi tahun 1998-1999 dalam pemberitaan *Suara Muhammadiyah*, penulis mendapat sumber primer, adapun sumber primer yang penulis dapat adalah:

1) Majalah Suara Muhammadiyah Tahun 1998-1999
   (a) "Muladi Tidak Pandang Bulu", Edisi 1-15 Mei 1998
   (b) "Babak Baru Muhammadiyah", Edisi 16-31 Mei 1998
   (c) "Memasuki Era Pasca Soeharto", Edisi 1-15 Juni 1998
   (d) "Agenda Reformasi Di Masa Transisi", Edisi 16-30 Juni 1998
   (e) "Muhammadiyah Gerakan Reformasi", Edisi 1-15 Juli 1998
   (f) "Perjuangan Mahasiswa Belum Selesai", Edisi 16-31 Juli 1998
   (g) "Muhammadiyah-Nu Pilar Bangsa", Edisi 1-15 Agustus 1998
   (h) "Semangat Hatta", Edisi 16-31 Agustus 1998
   (i) "Jangan Sembarang Memilih Partai", Edisi 1-15 September 1998
   (j) "Amien Rais Memperbarui Sistem Politik", Edisi 16-30 September 1998
   (k) "Berubahnya Tantangan Strategis Abri", Edisi 1-15 Oktober 1998
   (l) "PAN Dan Indoneisa Baru", Edisi 16-31 Oktober 1998
   (m) "Kepentingan Di Balik Kerusuhan", Edisi 1-15 November 1998
   (n) "Ada Apa Di Sidang Istimewa Mpr", Edisi 16-30 November 1998

[19] Nina herlina, "*Metode Sejarah*", (Bandung: satya historika) hal. 24.

(o) “Kebangkitan Partai Islam?”, Edisi 1-15 Desember 1998

(p) “Muhammadiyah 1998-1999”, Edisi 16-31 Desember 1998

(q) “Reformasi Dan Reformulasi Politik Umat Islam”, Edisi 1-15 Januari 1999

(r) “Islah Nasional Mungkinkah?”, Edisi 16-31 Januari 1999

(s) “Memilih Kampanye Di Media”, Edisi 1-15 Februari 1999

(t) “Memperjuangkan Ekonomi Rakyat”, Edisi 16-28 Februari 1999

(u) “Penyelesaian Konkret Terhadap Profokator”, Edisi 1-15 Maret 1999

(v) “Anatomi Bisnis Kkn”, Edisi 16-31 Maret 1999

(w) “Pemilu Damai, Mungkinkah?”, Edisi 1-15 April 1999

(x) “Mencari Caleg Berkualitas”, Edisi 15-30 April 1999

(y) “Komepetisi Calon Presiden”, Edisi 1-15 Mei 1999

(z) “Mencegah Konflik Horisontal Massa Partai”, Edisi 16-31 Mei 1999

(aa) “Skenerio Politik”, Edisi 1-15 Juni 1999

(bb) “Koalisi Sebuah Keharusan”, Edisi 16-30 Juni 1999

2) Majalah Risalah Persis 1998 - 1999

(a) “Ayo Rapatkan Shaf” Edisi Juni 1998

(b) “Islam Bukan Sara”, Edisi Juli 1998

(c) “Islam Politik Bangkit”, Edisi Agustus 1998

(d) “Awas Agitasi Propaganda”, Edisi September 1998

(e) “Penguasa Bejad Rakyat Sekarat” Edisi Oktober 1998

(f) “Sekulerisme Ideologi Iblis”, Edisi November 1998

(g) “Presiden Wanita Haram”, Edisi Desember 1998

(h) “Bila Muslim Minoritas”, Edisi Januari 1999

(i) “Hantu Islamofobi Gentayangan”, Edisi Februari 1999

(j) “Haram! Ragkul Kuffar”, Edisi Maret 1999

(k) “Berbahaya! Kultus Individu”, Edisi Mei 1999

(l) “Hantu Terorisme”, Edisi Juni 1999

3) Sumber Visual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(a) Vidio Pidato presiden soeharto saat menyatakan pengunduran diri pada 21 Mei 1998

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merujuk pada informasi yang berasal dari penulis atau sumber yang tidak secara langsung mengalami atau menyaksikan peristiwa, melainkan hanya mendengarnya dari orang lain. Dalam konteks sumber sekunder, penulis atau sumber tidak hidup pada waktu yang sama dengan peristiwa yang dideskripsikan. Sumber sekunder biasanya sudah mengalami proses pengolahan atau interpretasi sebelumnya, sehingga tidak lagi murni seperti sumber asli. Sederhananya, sumber sekunder adalah hasil dari analisis atau penjelasan berdasarkan sumber asli yang lebih awal.[20]

Adapun sumber sekunder yang ditemukan penulis adalah:

1) Bangsa Yang Belum Selesai, Indonesia Sebelum dan Sesudah Soeharto Karya Max Lane.
2) Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto Karya Basuki Agus Suparno.
3) Titik Tolak Reformasi (Hari-Hari Terakhir Preseiden Soeharto) Karya Edward Aspinall
4) Indonesia Pasca Soeharto Karya Geoff Forrester

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

**2. Kritik**

Kritik adalah tahap dalam metode penelitian sejarah yang dilakukan setelah proses heuristik selesai. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan menguji sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini, sumber-sumber tersebut diuji keabsahannya melalui proses kritik, baik secara intern maupun ekstern. Salah satu tujuan utama kritik ini adalah memastikan bahwa hanya sumber sumber yang otentik yang digunakan. Hasil dari proses kritik ini memperkuat keandalan sumber-sumber tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar utama dalam penulisan sejarah.[21]

[20] Nina herlina, "*Metode Sejarah"…,* hal 26.
[21] Sulasman, "*Metodologi Penelitian Sejarah"…,* hal. 104.

**a. Kritik Ekstern**

Kritik ekstern bertujuan untuk memastikan validitas dan tingkat akurasi yang tinggi dari sumber-sumber sejarah. Sementara itu, kritik ekstern bertujuan untuk menilai keabsahan dan autentisitas sumber sejarah. Kritik ekstern biasanya mencakup pemeriksaan detail seperti tanggal penerbitan, jenis tinta, dan kertas yang digunakan, apakah sesuai dengan periode waktu terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah sumber tersebut adalah asli, salinan, atau hanya fotokopi. Kritik terhadap sumber sejarah juga sering mencakup penilaian usia sumber tersebut dan budaya yang berkembang pada zamannya.[22] Cara menguji keaslian sebuah sumber dapat dilakukan dengan mempertimbangkan lima pertanyaan utama, yaitu:

1. Kapan sumber tersebut dibuat? Peneliti perlu menentukan tanggal pembuatan dokumen. peneliti dapat memperkirakan waktu pembuatannya dengan menetapkan batas waktu paling awal yang memungkinkan (terminus post quem) dan batas waktu paling akhir yang mungkin (terminus ante quem). Setelah perkiraan tanggal diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan tanggal tersebut dengan isi sumber untuk memastikan apakah sesuai dengan konteks zaman tersebut atau justru bertentangan.
2. Di mana sumber tersebut dibuat? Peneliti perlu melacak asal-usul dan lokasi pembuatan sumber untuk memperkuat keyakinan terhadap keasliannya. Lokasi pembuatan sumber bisa berbeda dari tempat penyimpanannya atau tempat di mana sumber itu ditemukan. Jika suatu dokumen disimpan di lokasi tertentu, seperti arsip keluarga, kantor dagang, instansi pemerintah, atau perpustakaan, keberadaan dokumen di tempat tersebut dapat memberikan indikasi awal tentang keaslian sumber tersebut.
3. Siapa yang membuat sumber tersebut? Pertanyaan ini menitikberatkan pada penyelidikan mengenai siapa pengarangnya. Setelah pengarang dokumen diidentifikasi, peneliti dapat menggali informasi lebih lanjut tentang latar belakangnya, seperti karakter, pendidikan, dan aspek lainnya. Namun,

[22] M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, *"Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar",* (Depok: Pranada Media), hal. 217.

keaslian dokumen sering kali lebih mudah dibuktikan melalui bukti fisik seperti tulisan tangan, jenis huruf, tanda tangan, atau bahkan sidik jari.

4. Dari bahan apa sumber tersebut dibuat? Analisis terhadap bahan atau material yang digunakan dapat mengungkap keaslian sumber dengan merujuk pada materi yang lazim digunakan pada zamannya. Misalnya, kertas jarang digunakan sebelum abad ke-15, teknologi percetakan belum dikenal, pensil grafit sulit ditemukan sebelum abad ke-16, dan kertas khas India baru mulai digunakan pada akhir abad ke-19. Pertimbangan semacam ini membantu dalam menguji otentisitas sumber.
5. Apakah sumber tersebut masih dalam bentuk aslinya? Pengujian terhadap integritas sumber menjadi hal yang sangat penting. Kerusakan atau perubahan pada sumber dapat terjadi, baik pada bagian tertentu maupun keseluruhan dokumen, yang mungkin disebabkan oleh upaya pemalsuan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja.

Cara kerja pada kritik ektern tersebut kemudian diterapkan dalam penelitian yang akan penulis teliti dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahapan heuristik, yakni sebagai berikut:

**1) Sumber Tulisan**

a) Majalah *Suara Muhammadiyah* Tahun 1998

Majalah ini di keluarkan langsung oleh Muhammadiyah, edisi yang keluar setiap bulan sebanyak 2 kali yakni rentan tanggal 1-15 dan 16-30 yang berarti majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1998 keluar sebanyak 24 majalah, penulis mengakses majalah *Suara Muhammadiyah* melalui kantor muhammadiyah, Jawa Barat. Tepatnya di jalan Jl. Sancang No.6, Burangrang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262. Kondisi dari majalah tersebut masih layak untuk dibaca selain itu rapih karna dari pihak kantor Muhammadiyah dijadikan buku pertahun (satu bundel) cover perbundelnya hardfile yang berarti edisi pertama ditahun itu yang dijadikan cover pertama diikuti dengan kertas majalah berbulan, tulisannya terbaca jelas, menggunakan bahasa indonesia adapun kondisi kertas nya sendiri setiap tahunnya berbeda beda ada yang sudah menguning ada juga yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sudah berbahan dasar matt paper. Naskah ini berbentuk cetakan, tidak ditulis tangan dan majalah ini dikeluarkan langsung oleh Majalah *Suara Muhammadiyah.*

b) Majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1999

Majalah ini dikeluarkan langsung oleh *Suara Muhammadiyah* yang berkantor pusat di Yogyakarta. kondisi majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1999 kurang lebih sama seperti tahun 1998 karena penulis mendapatkan majalah ini di kantor Muhammadiyah Jawa Barat, terdapat satu bundel pertahun yang mana jumlah total *Suara Muhammadiyah* tahun 1999 sebanyak 24 majalah yang terbit setiap sebulan dua kali. Kondisi majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1999 masih bisa dibaca dengan jelas, kertasnya masih bagus, warna majalah memang bervariasi ada yang sudah menguning tetapi tetap jelas bacaannya, tidak ada yang pudar, disimpan dengan baik di arsip kantor muahmmdiyah jawa barat.

c) Majalah Risalah Persis tahun 1998

Majalah ini dikeluarkan langsung oleh percetakan risalah persis yang berada di Gg. Hasan No.2 4024, Nyengseret, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, edisi yang keluar setiap bulan sekali sehingga banyaknya majalah yang diterbitkan selama setahun sebanyak 12 majalah. Kondisi dari majalah yang di dapat penulis masih layak untuk dibaca, tidak ada hilang, sobek ataupun sulit dibaca satu majalah terdapat kurang lebih 50-60 halaman, disimpan oleh pihak majalah risalah dengan rapih, sehingga penulis bisa mengakses dengan mudah, pertahunnya dibikin bundle khusus sehingga tidak berceceran dan hilang dibuat hard cover untuk pertahun majalahnya, naskah ini berbentuk cetakan tidak ditulis tangan dan dikeluarkan langsung oleh majalah risalah.

d) Majalah Risalah Persis tahun 1999

Majalah ini dikeluarkan langsung oleh percetakan risalah persis yang berada di Gg. Hasan No.2 4024, Nyengseret, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, edisi yang keluar setiap satu bulan sekali sehingga banyaknya majalah yang diterbitkan selama setahun sebanyak 12 majalah. Karena penulis mendapatkan dri tempat yang sama seperti majalah sebelumnya, kondisi majalah nya pun tidak ada perbedaan, layak untuk dibaca, tidak ada hilang,sobek ataupun luntur, pihak majalah risalah menyimpannya dengan baik dijadikan satu file dan bundle sehingga tidak sulit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

untuk diakses, naskahnya pum berbentuk cetakan tidak ditulis tangan dan dikeluarkan langsung oleh majalah risalah.

**2) Sumber Visual**

Vidio pidato presiden soeharto yang dikeluarkan oleh arsip nasional RI (ANRI) merupakan salah satu koleksi khusus yang dimiliki ANRI di channel youtube miliknya. Diupload pada tahun 2022 vidio yang berdurasi 4 menit 21 detik itu berisi tentang prsiden soeharto berpidato tentang pengunduran dirinya pada tanggal 21 mei 1998, suara yang terdapat dividio masih jelas dan dapat didengarkan, untuk gambar di vidio cukup terlihat jelas presiden soeharto, warna vidio berwarna bukan hitam putih.

**b. Kritik Intern**

Tahap kritik intern bertujuan untuk menilai tingkat keaslian sumber yang telah diperoleh, dengan fokus pada validitas dan kebenaran sumber tersebut dalam penelitian. Proses ini memastikan bahwa sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Di sisi lain, kritik intern lebih berfokus pada aspek "dalam," yakni isi kesaksian dari sumber tersebut. Peneliti harus menentukan apakah sumber tersebut pantas digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Langkah pertama dalam kritik intern adalah mengidentifikasi karakteristik sumber yang telah dikumpulkan. Langkah kedua melibatkan penilaian terhadap penulis sumber, karena penulis merupakan pihak yang memberikan informasi terkait. Langkah ketiga adalah membandingkan kesaksian dari berbagai sumber yang berbeda dan tidak saling berhubungan untuk mendapatkan hasil yang objektif.[23] Cara kerja pada kritik intern ini dilakukan untuk menemukan kesaksian sumber yang dapat diandalkan (reliable) atau tidak berdasarkan berdasarkan beberapa hal, di antaranya;

1. Mengidentifikasi isi sumbernya apakah sumber tersebut resmi atau bukan.
2. Kredibilitas saksi harus ditegakkan dengan menunjukkan kompetensi verasitas (kebenaran) apakah saksi mempunyai kapasitas untuk

[23] M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, "Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar." *(Depok: Kencana* (2014). Hal. 104.

menyampaikan itu atau tidak dan apakah saksi menyampaikannya dengan jujur atau tidak.

3. Memastikan sumber relevan dan akurat dengan permasalahan yang diteliti.
4. Memahami secara mendalam maksud dari informasi yang diberikan oleh saksi maupun informasi yang tersaji pada sumber tertulis.
5. Memastikan bahwa penulis ataupun saksi tidak terikat oleh kepentingan apapun untuk meminimalisir adanya subjektivitas Sejarah

**1) Sumber Tulisan**

a) Majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1998

Jika ditinjau dari kritik intern majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1998 Januari-Agustus banyak berisi tentang isu-isu politik, mulai dari krisis ekonomi, kerusuhan mei, penurunan presiden Soeharto, di dalam majalah *Suara Muhammadiyah* bagian pedoman sering memuat tulisan dari ketua muhammadiyah saat itu, yaitu Amien Rais. selain Amien Rais tulisan Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif juga sering dimuat di *Suara Muhammadiyah* bagian pedoman, isi dari pemberitaan *Suara Muhammadiyah* yang menanggapi isu politik pada masa itu banyak menggunakan pandangan islam. selain itu, memberitakan tentang sikap Muhammadiyah terhadap kondisi Indonesia saat itu terutama menjelang kerusuhan Mei, mulai dari Maret 1998 pemberitaan di *Suara Muhammadiyah* sudah gencar membahas tentang reformasi, tulisan Amien Rais dengan judul "Reformasi Sebagai Sebuah Keharusan" di pemberitaan *Suara Muhammadiyah* edisi Maret. Selain itu, "Jawaban Reformasi Politik", "Saat Ini Waktunya Reformasi", "Pidato Politik Amien Rais".

Bulan berikutnya, yaitu pada April isi pemberitaan *Suara Muhammadiyah* banyak mengangkat tentang BJ Habibie sebagai pengganti presiden. Selanjutnya setelah peristiwa Mei 1998 isi pemberitaan di *Suara Muhammadiyah* tepatnya pada September mengangkat isu tentang "Siapa Yang Pantas Menjadi Presiden Selanjutnya?", selain itu ada satu pemberitaan tentang Amien Rais paling tepat untuk menjadi presiden yang ditulis oleh Dr Syam Surizal Panggabean karna pada Agustus partai PAN (Partai Amanat Nasional) yang di ketuai oleh Amien Rais

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

didirikan. Pada bulan selanjutnya sampai Desember pemberitaan *Suara Muhammadiyah* banyak memberitakan tentang politik Amien Rais dan partai PAN.

b) Majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1999

Majalah *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1999 secara konsisten menyoroti dinamika politik nasional, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 1999 yang berlangsung pada 7 Juni 1999. Salah satu sorotan penting adalah munculnya narasi mengenai politik Islam dan keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam partai politik baru, khususnya Partai Amanat Nasional (PAN). Edisi Februari 1999 memuat opini pembaca yang mengkritisi kecenderungan majalah *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1998 yang dinilai terlalu banyak memberitakan PAN. Pembaca merasa bahwa dominasi pemberitaan terkait PAN memberi kesan bahwa *Suara Muhammadiyah* telah berpindah orientasi dari media resmi organisasi ke arah media partisan yang condong kepada PAN. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pada Sidang Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan pada 5–7 Juli 1998, Muhammadiyah secara resmi memutuskan untuk tidak mendirikan partai politik baru dan menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan struktural dengan partai politik manapun. Berdasarkan keputusan tersebut, redaksi *Suara Muhammadiyah* kemudian mengambil langkah strategis dan bijak dengan tidak lagi hanya memuat pemberitaan mengenai PAN, tetapi memperluas cakupan liputannya secara lebih proporsional. Menjelang pelaksanaan Pemilu 1999, khususnya pada edisi Maret, *Suara Muhammadiyah* semakin intens memberitakan isu-isu terkait pemilu. Hal ini tercermin dari pemilihan sampul depan yang menampilkan tema seputar pemilu dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), sebuah isu sentral dalam agenda reformasi saat itu. Setelah pemilu berlangsung dan presiden baru terpilih, majalah ini juga secara aktif memberitakan perkembangan politik nasional, sebagaimana terlihat dalam edisi-edisi September hingga Desember 1999 yang banyak membahas mengenai pemerintahan baru pasca pemilu.

c) Majalah Risalah tahun 1998

Jika ditinjau dari kritik intern isi dari majalah risalah secara garis besar memang membahas tentang ajaran islam menurut persis, tetapi di bulan-bulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

tertentu di tahun 1998 majalah risalah memuat berita politik tentang peristiwa reformasi seperti pada edisi Mei terdapat lebih banyak berita politik dibanding edisi sebelumnya, didalamnya ada berita tentang terpilihnya presiden habbie sebagai pengganti soeharto, selanjunya edisi majalah risalah di Juni masih memuat berita tentang peristiwa reformasi salah satunya *Mahasiswa Santri Pro Reformasi, Pak Harto Akhirnya Lengser Keprabon*, kemudian edisi Juli-Agustus majalah risalah memuat berita tentang partai politik khususnya partai islam, majalah risalah bulan Desember banyak berisi tentang berita tentang haramnya pemimpin wanita, seperti judul majalah pada edisi Desember "Presiden Wanita Haram!" .

d) Majalah Risalah tahun 1999

Kritik intern pada majalah risalah edisi tahun 1999 masih berisi tentang ketegangan politik seusai lengsernya soeharto, pada tahun ini pemberitaan di majalah risalah banyak memuat pemberitaan pemilu walau tidak di semua edisi di tahun 1999 memuat tentang masalah pemilu yang akan dilaksanakan pada 7 juni 1999. Pemberitaan politik ini biasanya dimuat di bagian sorotan utama contohnya pada edisi Maret dengan judul "*Bolehkah Kerja Sama Lintas Agama Dalam Satu Wadah Politik Partai?",* kemudian edisi Mei terdapat pemberitaan tentang pemikiran politik Amien Rais, edisi Oktober sampai November dalam pemberitaan majalah risalah masih membahas tentang pemilu dan presiden yang terpilih pada saat itu, khususnya November dan Desember ada satu tulisan Amien Rais yang kemudian di tanggapi oleh pihak persis dengan judul "*Amien Rais Dan Marger Partai Islam".*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

**d) Sumber Visual**

Vidio saat presiden soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 mei 1998, diunggah langsung oleh channel youtube Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan dicap sebagai koleksi khusus yang berisi pernyataan soeharto mengundurkan diri, dalam vidio yang berdurasi 4 menit 21 detik itu soeharto memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai presiden tepatnya di menit ke 2, dalam vidio tersebut soeharto mengundurkan diri di depan pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan pimpinan majlis permusyawaratan

indonesia, selain itu soeharto menyatakan bahwa Ir Bj Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan presiden 1998. Kredibilitasan sumber visual ini memiliki kebenaran karna mulai dari vidio itu di dapat sampai pada isi vidio terebut memiliki kesamaan yang akurat terhadap fakta sejarah yang ada.

### 3. Interpretasi

Interpretasi adalah hasil dari pemikiran atau penafsiran peneliti terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan dan dipahami. Pada tahap ini, peneliti perlu menjaga netralitas untuk menghindari penafsiran yang bersifat subjektif. Dalam konteks penelitian ilmiah, peneliti harus berfokus pada pemikiran objektif berdasarkan fakta-fakta sejarah atau bukti-bukti sejarah.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori politik media yang membahas hubungan antara media massa dan kekuasaan politik, serta bagaimana media mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses politik, aktor politik, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Teori ini mencakup berbagai pendekatan dan perspektif. Mengambil salah satu teori utama dalam politik media yaitu teori agenda setting yang di kemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald L untuk menganalisis tentang "Isu – isu Reformasi dalam Berita Media Organisasi Masyarakat Islam (Majalah Suara Muhammadiyah dan Majalah Risalah Persis Tahun 1998-1999)". Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 melalui publikasi "The Agenda Setting Function of The Mass Media". Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa media, tidak selalu mengarahkan apa yang kita pikirkan, namun sangat efektif dalam memengaruhi apa yang kita pikirkan. Media massa memiliki peran dalam membentuk perhatian masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Media menentukan isu-isu yang dianggap penting dan mengesampingkan yang tidak penting. Dengan kata lain, apa yang disoroti oleh media menjadi fokus masyarakat. Media juga memengaruhi siapa yang didukung dan peristiwa apa yang harus mendapat perhatian, sehingga agenda yang ditentukan media pada akhirnya menjadi agenda bagi masyarakat.[24] Agenda setting

[24] Elvinaro Ardianto, dkk. "*Komunikasi Massa Suatu Pengantar*". (Bandung: Simbiosa Rekatama Media), hal. 97.

diperkenalkan oleh Maxwell Mc. Combs dan Donald L menurutnya agenda setting adalah isu yang dipandang penting oleh redaksi suatu penerbitan pers, misalnya dijadikan pokok berita (headlines), diulang ulang. Teori agenda seting dimulai dengan suatu asumsi bahwa suatu media massa menyaring berita, artikel atau tulisan yang akan disiarkan.[25]

Dalam menganalisis pemberitaan peristiwa reformasi dalam *Majalah Suara Muhammadiyah* dan *Majalah Risalah* Persis, teori agenda setting yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw menjadi acuan yang relevan. Teori ini menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi audiens terhadap pentingnya suatu isu melalui frekuensi dan penekanan dalam pemberitaan. Dengan kata lain, media tidak mengatakan kepada publik apa yang harus dipikirkan, melainkan apa yang harus dipikirkan tentang. Dalam konteks penelitian ini, *Suara Muhammadiyah* yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Amien Rais salah satu tokoh utama gerakan reformasi memiliki kecenderungan untuk menempatkan isu reformasi sebagai agenda utama. Hal ini terlihat dari narasi yang lebih politis, artikulatif, dan mendukung perubahan sistemik. Sebaliknya, *Majalah Risalah* sebagai media dakwah Persis lebih menyoroti reformasi dari sudut pandang moral dan keagamaan, tanpa keterlibatan langsung dalam arus politik. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing media menyusun agenda pemberitaannya sesuai dengan visi, posisi, dan orientasi organisasinya. Dengan demikian, teori agenda setting memberikan kerangka yang tepat untuk memahami bagaimana dua media Islam ini membentuk persepsi dan opini publik umat terhadap peristiwa reformasi melalui strategi penyusunan isu yang berbeda.

**4. Historiografi**

Historiografi secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu histori yang berarti sejarah dan grafi memiliki arti deskripsi/penulisan. Kata Historia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, kata "historia" dipakai untuk pemaparan mengenai

[25] Winda kustiawan, dkk. "*Teori-Teori dalam Komunikasi Massa*". Jurnal Telekomunikasi, Kendali dan Listrik Vol. 3 – No.2, hal. 117.

tindakan - tindakan manusia yang bersifat kronologis terjadi di masa lampau. Penulisan sejarah adalah puncak segala sesuatu. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah sebagai historie-recite, sejarah sebagaimana dikisahkan yang mencoba mengangkat dan memahami historie - realitie, sejarah sebagaimana terjadinya. Dan hasil penulisan inilah yang disebut historiografi.[26]

Dalam tahapan historiografi ini penulis akan menggambarkan secara garis besar tentang peristiwa reformasi dalam pemberitaan *Suara Muhammadiyah* tahun 1998-1999: BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi).

BAB II, pada bagian ini penulis membahas mengenai bagaimana kondisi Indonesia pada sebelum reformasi dan saat reformasi tepatnya pada tahun 1998 1999 di bidang konomi, politik dan sosial budaya.

BAB III, selanjutnya pada bagian ini membahas tentang bagaimana pemberitaan peristiwa reformasi 1998-1999 di majalah suara muhammadiyah dan majalah risalah

BAB IV, pada bab terakhir penulis membahas tentang kesimpulan hasil penelitian mengenai peristiwa reformasi pada pemberitaan suara muhammdiyah dan majalah risalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[26] Kartodirdjo, "*Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*" (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 97.